

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kekuatan mengikatnya kontrak memainkan peran sentral dalam menentukan tanggung jawab hukum dalam sengketa kelebihan bayar antara DPU dan PT. Combina Costraco. Kontrak bukan hanya sebuah perjanjian hukum, tetapi juga merupakan instrumen yang mencerminkan kompleksitas dinamika hubungan kontraktual, hak, dan kewajiban. Dari segi hukum, kekuatan mengikatnya kontrak menentukan kewajiban dan hak masing-masing pihak secara tegas. Analisis mendalam terhadap ketentuan kontrak relevan menjadi dasar untuk menilai ketaatan terhadap perjanjian dan memahami implikasi hukum yang terkait dengan sengketa kelebihan bayar. Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa kontrak bukanlah entitas statis. Perubahan kondisi dan faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi dinamika hubungan kontraktual. Klausul-klausul yang mengatur perubahan, *force majeure*, dan penyesuaian lainnya perlu dieksplorasi untuk memahami bagaimana kontrak menanggapi perubahan lingkungan bisnis atau keadaan tertentu.
2. Prinsip kekuatan mengikatnya kontrak muncul sebagai perisai utama yang melindungi hak-hak PT. Combina Costraco dalam sengketa kelebihan bayar. Kontrak, bukan hanya sekadar perjanjian bisnis, tetapi merupakan fondasi hukum yang memberikan jaminan konkret terhadap hak-hak kontraktual perusahaan. Dengan demikian, prinsip ini menjadi pijakan utama dalam menghadapi sengketa dan menjaga integritas hak-hak yang dimiliki PT. Combina Costraco. Prinsip kekuatan mengikatnya kontrak menegaskan bahwa

kontrak adalah perjanjian yang sah dan berlaku, dan hak-hak yang tercantum di dalamnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks sengketa kelebihan bayar, hal ini berarti setiap ketentuan kontrak yang berkaitan dengan pembayaran, penyelesaian sengketa, dan hak-hak lainnya harus dihormati dan ditegakkan.

3. Dalam konteks penyelesaian sengketa, prinsip ini membangun landasan yang kuat untuk menilai tindakan dan klaim masing-masing pihak. Pihak yang merasa hak-haknya dilanggar dapat mengacu pada kontrak sebagai panduan utama dan meminta penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama. Namun, tingkat kritisitas diperlukan untuk menentukan sejauh mana hak-hak tersebut benar-benar dilanggar dan apakah klaim yang diajukan dapat dibenarkan secara substansial.

Selanjutnya, prinsip ini mengandung implikasi moral dan etika dalam penegakan kontrak. Tidak hanya sebatas kewajiban hukum, tetapi sebagai kewajiban moral dan etika bisnis yang melibatkan kepercayaan dan integritas. Kritisitas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam sengketa tersebut tidak hanya legal tetapi juga etis dan mematuhi norma-norma bisnis yang berlaku.

B. Saran-saran

1. Saran kepada PT. Combina dan Dinas Pekerjaan Umum, mengingat penuh dengan permasalahan yang rumit terhadap sengketa kelebihan bayar dibutuhkan klausul tambahan dalam kontrak terutama bagi pemilik usaha pengadaan barang dan jasa terhadap penyelesaian sengketa kelebihan bayar demi menjaga esensi

dari kontrak yang berprinsip mengikat layaknya undang-undang untuk masing-masing pihak.

2. Saran kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam penyelsain sengketa selain dari pengadilan, pertimbangkan dalam penyelsain sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrase .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *TEORI - TEORI HUKUM*. Setara Press, Malang.
- Anggreani, RR, 2021, *Hukum Kontrak Bisnis*. Unpam Press, Jakarta
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2011, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Batubaram, Chuzaimah. 2015, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat*, FEBI UIN-SU Press, Medan.
- Camblis, William J. dan Robert B. Seidmen, 1971, *Law, Order, and Power*, Mess Addison, Wesly.
- Emirzon, Joni, and Muhammad Sadi, 2021, *Hukum Kontrak (Teori Dan Praktik)*. Kencana, Jakarta.
- Hengki, Firmanda. 2020, *Hukum Kontrak*, Taman Karya Pekanbaru.
- Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*. Grasindo, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 2002, *Metodologi Research*. Edisi Refi, Andi Ofset, Yogyakarta.
- . 2000, *Metodologi Research Jilid I*. Andi Ofset, Yogyakarta.
- Masri Sangaribun dan Efendi Sofran, 1995, *Metode Penelitian Survey*. LP3S, Jakarta.
- Margono, Suyud. 2000. *Altrernative Dispute Resolution dan Arbitase*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyana, Deddy, 2001, *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. STPN Press, Yogyakarta.
- Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, Mataram
- Pangestu, Muhammad Teguh, 2019. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Social Politik Genius (SIGN), Makasar.
- Salim H.S. 2009, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar

Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta

———. 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta

Soemitro, Ronny H, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia, Jakarta.

Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, Media Sains Indonesia, Kota Bandung – Jawa Barat.

Usman, Rachmadi. 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Widnyana, I Made 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Fikahati Anesks, Jakarta.

Wijaya, Budi Arianto dan Vanessha Dasenta, 2021, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, Andi Ofset, Yogyakarta.

Wiwoho, Jamal., and Mashdurohatun Anis, 2017, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis*. UNDIP PRESS, Semarang.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 14/G/2020/PTUN.PDG

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/B/2020/PT.TUN-MDN

Putusan Mahkamah Agung, Kasasi Nomor : 475 K/TUN/2021

C. Sumber Lain

Arti Kata Bayar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.
<https://kbbi.web.id/bayar>.

Andriani, Fitria, and Imran Zulfitri. 2021. “Berakhirna Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Syari’ah Dan Peradilan Islam* Vol 1 Nomor 2

- Boboy, Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati. 2020 “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin.” *Notarius* Volume 13, Nomor. 2
- Detik “Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, Dan Contohnya.” <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya>.
- Dinas - Wikikamus Bahasa Indonesia. <https://id.wiktionary.org/wiki/dinas>.
- Jasa Konstruksi : Pengertian dan Jenis Jasa – Construction Plus Asia, 2023, <https://www.constructionplusasia.com/id/jasa-konstruksi-1/>.
- Kamaludin, 2020, “Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.” *Journal Of Law, Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1
- Makna Kata Pekerjaan, Profesi dan Jabatan, Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu, 2023. <https://kantorbahasabengkulu.kemdikbud.go.id/makna-kata-pekerjaan-profesi-dan-jabatan/>.
- Mengenal Jasa Kontraktor dan 3 Cakupan Kerjanya, 2023. <https://www.rumah.com/panduan-properti/7-panduan-memahami-layanan-kontraktor-21025>.
- Pengertian Sengketa. Arti dalam bahasa dan penafsiran hukum, 2023 https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/900/mod_resource/content/1/a_pengertian_sengketa.html.
- Pengertian Impilikasi, Berikut Arti Jenis dan Contohnya, 2023. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya>.
- Peraturan Artikel Pembatasan Asas “Freedom Of Contract” dalam perjanjian Komersial, Pengadilan Negeri Banda Aceh. 2023. <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>.
- Prosedur dan Tata-tata cara Pembayaran Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) 2023, <https://www.kerkuse.id/2018/10/prosedur-dan-tata-tata-cara-pembayaran-sertifikat-bulanan-monthly-certificate.html>.
- Ridwan Khairandy, 2011. Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak. *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011: 36 - 55* 18 (2011): 36–55.
- Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – Ilmu Pengadaan, 2023. <https://ilmu.lpkn.id/2023/03/29/227571/>.